

Received: 2022-09-07, Received in revised form: 2023-05-18, Accepted: 2023-06-10

Peningkatan Kemampuan Guru dalam Penyusunan Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) melalui Workshop (Penelitian Tindakan di MTsN 2 Kota Lhokseumawe)

Nurlaila

Kementerian Agama Kota Lhokseumawe

email: nurlailakpn@gmail.com

DOI: <https://doi.org/10.47766/itqan.v12i2.664>

ABSTRACT

In the 2013 Curriculum (Kurtilas), learning through any method or model is inseparable from the evaluation of determining the Minimum Competency Criteria (KKM) as the initial stage of assessing learning outcomes. In reality, many teachers still fail to analyze and consider the principles in determining the KKM. The aim of this research is to improve teachers' skills in developing KKM at MTsN 2 Kota Lhokseumawe. The emancipatory type was chosen as the method for this action research. The Kemmis model design was used as the research design, consisting of four stages: planning, implementation, observation, and reflection. This action research also encouraged the researcher to deeply address practical problems in educational institutions. Based on the research findings and discussions, it can be concluded that the workshop enhanced teachers' ability to develop KKM. In the first cycle, three out of five criteria for assessing teachers' performance did not meet the criteria. However, in the second cycle, all aspects met the criteria. The assessment results for determining the KKM improved; in the first cycle, the ability to determine the KKM reached 83.75%, while in the second cycle, there was an increase to 93.25%. The research findings also indicated a significant increase in the percentage of teachers ready to fulfill the workshop implementation aspect. Therefore, it can be said that the response of teachers at MTsN 2 Lhokseumawe towards the workshop activities was very positive.

Keywords: Teacher Capacity Building, Minimum Competency Criteria, Workshop

ABSTRAK

Dalam Kurikulum 2013 (Kurtilas), pembelajaran melalui metode atau model apa pun tidak terlepas dari evaluasi penetapan Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) sebagai tahap awal pelaksanaan penilaian hasil belajar. Realita di lapangan, masih banyak guru yang tidak melakukan analisis dan tidak memperhatikan prinsip-prinsip dalam penetapan KKM. Tujuan penelitian ini adalah untuk meningkatkan keterampilan guru dalam menyusun KKM di MTsN 2 Kota Lhokseumawe. Tipe emansipatoris dipilih sebagai metode penelitian tindakan ini. Rancangan model Kemmis digunakan sebagai

rancangan penelitian yang terdiri dari empat tahapan, yaitu: perencanaan, pelaksanaan, observasi, dan refleksi. Penelitian tindakan ini juga mendorong peneliti untuk memecahkan masalah-masalah praktis di lembaga pendidikan secara mendalam. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa workshop meningkatkan kemampuan guru dalam menyusun KKM. Pada siklus I, tiga dari lima kriteria penilaian kinerja guru tidak memenuhi kriteria. Namun pada siklus kedua, semua aspek memenuhi kriteria. Hasil penilaian untuk menentukan KKM meningkat; pada siklus I kemampuan dalam penetapan KKM mencapai 83,75%, sementara pada siklus II terjadi peningkatan, yaitu 93,25%. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa persentase guru yang siap memenuhi aspek pelaksanaan workshop menunjukkan peningkatan yang sangat signifikan. Sehingga dapat dikatakan respon guru MTsN 2 Lhokseumawe sangat positif terhadap kegiatan workshop.

Kata Kunci: Peningkatan Kemampuan Guru, Kriteria Ketuntasan Minimal, Workshop

PENDAHULUAN

Sistem pendidikan di Indonesia mengalami perubahan signifikan dengan diperkenalkannya Kurikulum 2013 (Kurtilas). Salah satu aspek penting dalam Kurtilas adalah evaluasi hasil belajar siswa melalui penetapan Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM). KKM digunakan sebagai acuan dalam menentukan apakah siswa telah mencapai kemampuan minimum yang diharapkan dalam suatu mata pelajaran.

Kurikulum 2013 menekankan pendekatan saintifik pada tingkat dasar dan menengah. Tujuan pelaksanaannya adalah untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan meningkatkan daya saing bangsa sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Dalam implementasi kurikulum 2013 diharapkan sumber daya manusia yang produktif, kreatif, inovatif dan emosional, penguatan kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan (Machali, 2014).

Pelaksanaan penilaian pada Kurikulum 2013 secara eksplisit meminta agar guru-guru di sekolah menggunakan pendekatan berimbang pada tiga ranah domain, yaitu kognitif, afektif, dan psikomotorik sesuai dengan tujuannya yang hendak diukur. Dibandingkan dengan kurikulum sebelumnya, penekanan penilaian menyeluruh terhadap ketiga aspek tersebut memberikan perubahan penilaian yang lebih baik. Penilaian memiliki peran besar dalam menentukan kesuksesan pendidikan. Penilaian yang baik memberikan dampak pada proses pembelajaran (Popham, 2009) dan menjadi acuan untuk tindakan atau kebijakan selanjutnya (Mardapi, 2012).

Penilaian adalah bagian dari peningkatan kualitas layanan pendidikan, salah satu prioritas pembangunan pendidikan bangsa. Langkah-langkah yang akan diambil harus diidentifikasi untuk mengumpulkan informasi tentang

kemajuan belajar siswa mengenai sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Untuk menjamin kualitas layanan pendidikan, yang terpenting adalah menyediakan kurikulum yang optimal dan evaluasi yang komprehensif berdasarkan standar pendidikan yang ditetapkan oleh pemerintah.

Satuan pendidikan hendaknya mengembangkan kurikulum sendiri sesuai dengan karakteristik, kebutuhan, potensi peserta didik, masyarakat dan lingkungannya. Penjabaran Kompetensi Inti (KI) dan Kompetensi Dasar (KD) dalam rangka pengembangan kurikulum pada tingkat satuan pendidikan dilakukan melalui pengembangan kurikulum dan rencana pelaksanaan pembelajaran. Silabus merupakan penjabaran umum KI-KD yang selanjutnya berkembang dalam indikator, kegiatan pembelajaran, materi pembelajaran, dan penilaian. Penjabaran lebih lanjut dari silabus dalam bentuk rencana pelaksanaan pembelajaran.

Penetapan Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) merupakan Kriteria paling rendah untuk menyatakan siswa mencapai ketuntasan dinamakan Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM). KKM harus ditetapkan di awal tahun ajaran dimulai, melalui musyawarah dewan guru pada satu madrasah. Namun, dalam pelaksanaannya, masih banyak guru yang menghadapi kesulitan dalam menyusun KKM yang sesuai dengan prinsip-prinsip yang ditetapkan. Hal ini bisa disebabkan oleh kurangnya pemahaman tentang konsep dan tujuan KKM, kurangnya pengetahuan tentang metode dan teknik penyusunan KKM, serta kurangnya pelatihan yang memadai dalam hal ini.

Masalah ini juga terjadi di MTsN 2 Kota Lhokseumawe, di mana para guru mengalami kesulitan dalam menyusun KKM yang efektif dan dapat menggambarkan pencapaian hasil belajar siswa dengan akurat. Hal ini dapat berdampak negatif pada proses pembelajaran dan evaluasi, serta pada kualitas pendidikan yang diberikan oleh madrasah. Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya untuk meningkatkan kemampuan guru dalam menyusun KKM yang tepat dan efektif.

Berdasarkan hasil pembelajaran akademik di MTSN 2 Lhokseumawe diketahui bahwa guru tidak melakukan penetapan menetapkan kriteria ketuntasan minimal berdasarkan hasil analisis. Guru kurang memperhatikan prinsip dan prosedur penerapannya. Umumnya kriteria ketuntasan minimal ditentukan secara terbalik, seperti kriteria ketuntasan minimal mata pelajaran ditentukan, kemudian kriteria ketuntasan minimal keterampilan dasar disesuaikan. Kriteria ketuntasan minimal kemampuan dasar diisi hanya jika perhitungan akhir cocok dengan KKM mata pelajaran. Ada yang menetapkan kriteria ketuntasan minimal di pertengahan Tahun Pelajaran.

Dari 30 guru yang disupervisi pada Tahun Pelajaran 2020/2021, hanya 8 (26,67%) yang mampu menganalisis, mengelola, dan mengadministrasikan KKM

secara memadai. Sementara 22 guru (73,33%) tidak melakukan prosedur keputusan KKM berdasarkan analisis. Cara-cara yang dilakukan justru dengan mengira-ngira, mengikuti milik rekan sejawat, menggunakan kembali KKM tahun pelajaran sebelumnya, dan membuat kesepakatan dengan rekan sejawat. Bahkan terdapat guru yang belum membuat KKM.

Mengingat pentingnya KKM, dan guru dituntut mampu menerapkannya dengan tepat, maka kemampuan guru dalam menetapkan KKM sangat diharapkan baik sehingga kualitas pembelajaran yang diselenggarakan oleh guru juga positif. Sehingga workshop dalam rangka peningkatan kemampuan guru menyusun KKM dipandang penting.

Workshop dianggap sebagai salah satu metode yang efektif untuk memberikan pemahaman, pengetahuan, dan keterampilan yang diperlukan kepada para guru dalam menyusun KKM (Nurwati, 2020; Sudanta, 2015) yang sesuai dengan prinsip-prinsip yang ditetapkan dalam Kurtilas.

Melalui penelitian tindakan di MTsN 2 Kota Lhokseumawe, diharapkan dapat terjadi peningkatan kemampuan guru dalam menyusun KKM melalui workshop. Dengan adanya workshop, diharapkan guru akan memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang tujuan, konsep, dan prinsip-prinsip penyusunan KKM. Selain itu, melalui siklus tindakan yang terdiri dari perencanaan, pelaksanaan, observasi, dan refleksi, para guru dapat terlibat secara aktif dalam memecahkan masalah praktis yang terkait dengan penyusunan KKM di lembaga pendidikan.

Dengan demikian, penelitian tindakan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi positif dalam meningkatkan kemampuan guru dalam menyusun KKM yang efektif, sehingga dapat meningkatkan kualitas pendidikan yang diberikan kepada siswa di MTsN 2 Kota Lhokseumawe.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian tindakan terkait kemampuan dan kualitas guru dalam menentukan Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM). Tindakan yang dilakukan adalah workshop sebagai upaya membangun kapasitas guru dalam menetapkan kriteria ketuntasan minimal. Jenis penelitian tindakan yang dipilih adalah jenis emansipatori. Rancangan penelitian yang digunakan adalah rancangan model Kemmis yang terdiri dari empat langkah yaitu perencanaan, pelaksanaan, observasi, dan pertimbangan (Arikunto et al., 2021). Penelitian ini dilaksanakan dalam dua siklus dengan langkah-langkah pada setiap siklusnya terdiri dari: perencanaan, pelaksanaan, observasi, dan refleksi.

Subjek dalam penelitian ini adalah tenaga pendidik yang berjumlah 30 orang, terdiri atas 10 orang laki-laki, dan 20 guru perempuan. Adapun yang

menjadi objek penelitian adalah kemampuan tenaga pendidik dalam penetapan kriteria ketuntasan minimal (KKM).

Penelitian dilakukan pada guru MTsN 2 Kota Lhokseumawe. Pemilihan lokasi penelitian karena sekolah tersebut merupakan sekolah binaan, di mana dalam hasil supervisi pengawas madrasah ditemukan kelemahan guru dalam penetapan KKM. Penelitian dilakukan mulai dari persiapan sampai dengan pelaporan selama tiga bulan (Januari-Maret) dan dirancang dalam dua siklus, yang mana masing-masing siklus terdiri atas: perencanaan, pelaksanaan, observasi, dan refleksi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian Siklus I

Pada tahap ini dilakukan observasi terhadap implementasi langkah-langkah yang difokuskan pada kompetensi guru dalam menetapkan kriteria ketuntasan minimal hasil pelaksanaan workshop. Tujuan dilakukannya observasi adalah untuk menentukan kegiatan mana yang dipertahankan, diperbaiki, atau dihapus guna meningkatkan kemampuan peserta untuk mengetahui apakah kegiatan pembinaan dalam workshop benar-benar berjalan sesuai tujuan yang ada dan untuk menentukan kriteria penyelesaian minimal. apa yang kamu butuhkan.

Pengamatan difokuskan pada aktivitas peserta terkait kesiapan mental dan fisik guru, kesiapan materi yang dibawa guru ke workshop, kehadiran guru, kesiapan laptop, kualitas KKM, maupun tanggapan guru. Gambaran hasil yang diperoleh berdasarkan fakta yang terekam/observasi lapangan dari para guru MTsN 2 Kota Loksemawe untuk pertama kalinya adalah bahwa dalam hal penetapan kriteria ketuntasan minimal menjadi tidak terlalu penting. Selain itu juga kurangnya pelatihan dan sosialisasi KKM.

Hasil observasi kegiatan dengan menggunakan lembar observasi yang disiapkan oleh total 30 peserta diperoleh data sebagai berikut:

Tabel 1. Pengamatan terhadap kesediaan guru untuk mengikuti workshop dalam menetapkan kriteria ketuntasan minimal siklus I

	Aspek yang Diamati							
	Kesiapan mental dan fisik guru		Kesiapan bahan		Kehadiran guru		Kesiapan laptop	
	S	TS	S	TS	H	TH	S	TS
	26	4	8	22	27	3	12	18

Persentase (%)	86.67	13.33	26.67	73.33	90.00	10.00	40.00	60.00
Pencapaian Indikator Keberhasilan	Sudah tercapai		Belum tercapai		Sudah tercapai		Belum Tercapai	

Dari tabel 1 di atas, terlihat bahwa: pada aspek kesiapan mental dan fisik; 26 orang atau 86.67 % peserta siap dan 4 orang atau 13,33% tergolong belum siap. Pada aspek kesiapan bahan; tampak 8 orang atau 26.67 % peserta siap dan 22 orang atau 73.33 % belum siap. Pada aspek kehadiran guru tampak 27 atau 90.00 % hadir dan 3 orang atau 10.00% tidak hadir. Pada aspek kesiapan laptop tampak 12 orang atau 40.00 % siap dan 18 orang atau 60.00 % belum siap. Berdasarkan deskripsi ini kesiapan guru dalam mengikuti workshop belum memenuhi kriteria keberhasilan untuk semua aspek.

Tabel 2. Hasil Penilaian Guru dalam Penetapan Kriteria Ketuntasan Minimal Siklus I

No.	Aspek	Jumlah Nilai	Rata-rata Nilai	Persentase
1.	Penetapan KKM mata pelajaran memperhatikan tiga aspek; kompleksitas, daya dukung, dan intake.	3,300	84,62	84,62
2.	KKM dibuat per-indikator, KD, KI, dan terakhir mata pelajaran.	2.350	60,26	60,26
3.	Hasil penetapan KKM oleh guru Madrasah disahkan oleh kepala Madrasah.	3,300	84,62	84,62
4.	KKM yang ditetapkan disosialisasikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan yaitu peserta didik, orang tua, dan dinas pendidikan.	3,900	100	100
5.	KKM dicantumkan dalam LHB	3,900	100	100
	Jumlah	16,750		
	Rata-rata	83,75		

Keterangan: Amat Baik	=	85	<	A	≤	100
B a i k	=	70	<	B	≤	85
C u k u p	=	56	<	C	≤	70
Kurang	=	56				

Dari tabel 2 di atas, seluruh aspek yang dibuat per indikator, kemudian KD, KI, dan terakhir mata pelajaran dalam kategori cukup. Aspek pengesahan oleh Kepala Madrasah berada pada kategori baik, sementara aspek no. 4 dan 5 menyatakan bahwa caranya guru menentukan KKM pasti disosialisasikan kepada siswa, orang tua, dan ditulis dalam LHB.

Berdasarkan uraian pada tabel 1 dan 2, kemampuan guru dalam menetapkan kriteria ketuntasan minimal MTsN 2 Kota Loksumawe belum memenuhi standar dengan indikator kinerja yang ditetapkan untuk semua indikator (kecuali indikator 4 dan 5). Dengan kondisi seperti ini, diperlukan tindakan konkret yang kemungkinan dapat meningkatkan kemampuan guru dalam menentukan kriteria ketuntasan minimal melalui kegiatan workshop.

Refleksi

Dari hasil penelitian yang teramati, terlihat bahwa kemampuan guru dalam menetapkan KKM pada siklus I belum menunjukkan hasil sesuai dengan indikator yang telah ditentukan. Setelah meninjau hasil dan melihat refleksi yang diperoleh, diputuskan untuk memperbaiki kegiatan workshop guna mengklarifikasi aspek-aspek yang belum sesuai dengan indikator kinerja yang ditentukan. Sehingga diputuskan untuk memperbaiki beberapa langkah pada siklus I.

Secara khusus, perbaikan difokuskan pada penetapan KKM untuk setiap indikator yang belum menunjukkan hasil untuk selanjutnya dilakukan perbaikan alat/bahan pada siklus II nantinya.

Deskripsi Hasil Siklus II

Pada siklus II dilakukan langkah-langkah yang mencerminkan hasil refleksi dari siklus I dengan penekanan pada penjelasan aspek-aspek yang belum dimengerti oleh guru pada saat menentukan KKM dan lebih mendalami aspek pembinaan secara individual. Siklus II diikuti oleh 30 guru untuk memperdalam pengetahuan tentang penetapan KKM. Setelah pelaksanaan siklus II yang mengacu pada refleksi dan pemecahan masalah di siklus I, menghasilkan data sebagai berikut:

Tabel 3. Hasil Observasi Kesiapan Guru dalam Workshop Siklus II

	Aspek yang Diamati							
	Kesiapan mental dan fisik guru		Kesiapan bahan		Kehadiran guru		Kesiapan laptop	
	S	TS	S	TS	H	TH	S	TS
	27	3	26	4	28	2	24	6
Persentase (%)	90.00	10.00	86.67	13.33	93.33	6.66	80.00	20.00
Pencapaian Indikator Keberhasilan	Sudah tercapai		Sudah tercapai		Sudah tercapai		Sudah tercapai	

Dari tabel 3 di atas dapat dilihat bahwa 27 orang atau 90,00% siap dan 3 orang atau 10,00% tidak siap dalam hal kesiapan mental maupun fisik. Mengenai kesiapan materi, 26 atau 86,67% siap dan 4 atau 13,33 tidak. Tingkat kehadiran adalah 8 (93,33%) dan 2 tidak hadir (6,66%). Dari segi kesiapan laptop, 24 atau 80,00% tampak siap, sedangkan 6 atau 20,00% tampak tidak siap.

Uraian di atas menunjukkan bahwa kesiapan guru untuk mengikuti workshop belum mencapai 100% pada semua aspek. Hal ini (kemungkinan) karena banyak dari mereka adalah guru pengabdian yang mengikuti kelas jika ada jam mengajar. Adapun evaluasi terhadap kriteria ketuntasan minimal yang ditentukan oleh guru peserta workshop pada siklus II menunjukkan hasil seperti pada tabel di bawah ini.

Tabel 4. Hasil Penilaian Guru dalam Penetapan Kriteria Ketuntasan Minimal Siklus II

No.	Aspek	Jumlah Nilai	Rata-rata Nilai	Persentase
1.	Penetapan KKM mata pelajaran memperhatikan tiga aspek; kompleksitas, daya dukung, dan intake.	4,000	100	100
2.	KKM dibuat per-indikator, KD, KI, dan terakhir mata pelajaran.	2.650	66,25	66,25
3.	Hasil penetapan KKM oleh guru Madrasah disahkan oleh kepala Madrasah.	4,000	100	100

4.	KKM yang ditetapkan disosialisasikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan yaitu peserta didik, orang tua, dan dinas pendidikan.	4,000	100	100
5.	KKM dicantumkan dalam LHB	4,000	100	100
	Jumlah	18,650		
	Rata-rata	93,25		

Keterangan: Amat Baik = 85 < A ≤ 100
 B a i k = 70 < B ≤ 85
 C u k u p = 56 < C ≤ 70
 Kurang = 56

Dari tabel 4 di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa kemampuan guru dalam menentukan kriteria ketuntasan minimal pada siklus II sangat baik (rata-rata 93,25%). Sementara beberapa aspek lainnya masuk pada kategori kriteria baik dan kriteria cukup (aspek 2). Dalam hal ini, KKM dibuat untuk masing-masing indikator, kemudian KD, KI, dan terakhir mata pelajaran.

Berkaitan dengan hal tersebut, terdapat 6 orang guru MTsN 2 Kota Loksemawe dengan status guru tidak tetap dan 5 orang guru honorer bersertifikasi masih merasa kesulitan untuk menyusun silabus, RPP, dan menetapkan indikator pada KD, KI pada mata pelajaran. Sehingga berdampak pada ketidakmampuan dalam penyusunan kriteria ketuntasan minimal secara mendetail per-indikator.

Penilaian ini menjadi penting untuk mendapatkan gambaran tentang reaksi guru terhadap kegiatan workshop. Dari skor atau persentase guru yang mampu menentukan KKM dengan memenuhi mekanisme penilaian awal, pada siklus I dan siklus II sebesar 6%, 83,75%, dan 93,25%. Hal ini menunjukkan peningkatan yang sangat jelas dan baik.

Pembahasan Hasil Penelitian

Kemampuan guru MTsN 2 Kota Loksemawe dalam penentuan KKM melalui kegiatan analisis, mengelola, dan mengadministrasikan, awalnya hanya mencapai 26,67% (8 orang), sementara 22 guru (73,33%) tidak melakukan prosedur keputusan KKM sebagaimana yang diharapkan. Kemampuan guru menunjukkan peningkatan yang sangat jelas dan baik. Pasca dilaksanakannya

workshop KKM, terjadi peningkatan sebesar 93,25%. Hal ini mengindikasikan bahwa KKM memiliki fungsi yang sangat penting sebagai acuan para guru untuk dapat menilai kompetensi siswa secara objektif. Sehingga para guru diharapkan mampu menyusunnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Hasil ini sesuai dengan penelitian Nurmalia yang menjelaskan bahwa KKM: 1) menjadi acuan bagi pendidik dalam menilai kompetensi peserta didik terhadap kompetensi dasar mata pelajaran yang dipelajari, 2) sebagai acuan bagi siswa mempersiapkan ujian mata pelajaran, 3) digunakan sebagai bagian dari komponen evaluasi program pembelajaran yang dilaksanakan di sekolah, 4) sebagai tolok ukur implementasi program kurikulum dan evaluasi hasil dapat diturunkan dari keberhasilan pencapaian KKM, 5) kontrak pendidikan antara pendidik dan peserta didik, dan antara satuan pendidikan dan masyarakat, 6) merupakan tujuan satuan pendidikan untuk memperoleh kompetensi pada setiap mata pelajaran (Nurmila, 2017).

Kriteria ketuntasan minimal harus dicantumkan dalam Laporan Hasil Belajar (LBH) sebagai acuan penanganan hasil belajar siswa (Depdiknas, 2008: 3). Keputusan KKM didasarkan pada kriteria yang telah ditentukan, yaitu: 1) tingkat kompleksitas, kesulitan atau kerumitan setiap indikator, kompetensi dasar, dan standar kompetensi yang harus dicapai oleh peserta didik, 2) kemampuan sumber daya pendukung dalam penyelenggaraan pembelajaran pada masing-masing sekolah, 3) tingkat kemampuan (*intake*) rata-rata peserta didik di sekolah yang bersangkutan (Hanum, 2017; Pangastuti & MunfaAti, 2018).

Kriteria ketuntasan minimal ditetapkan oleh satuan pendidikan berdasarkan kesepakatan bersama dengan guru profesional dari satuan pendidikan maupun beberapa satuan pendidikan yang memiliki karakteristik yang hampir mirip. Pertimbangan utama dalam menentukan kriteria ketuntasan minimal adalah pertimbangan akademik dari pendidik atau forum Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP). Ini menjadi penting karena Kriteria Ketuntasan Minimal sebagai standar umum untuk pendidik, siswa, dan orang tua siswa.

Kriteria ketuntasan minimal dinyatakan dengan angka maksimal sampai dengan 100 (seratus) karena merupakan persentase pencapaian kompetensi. Skor maksimum 100 adalah ukuran kelengkapan yang ideal. Secara nasional, angka kriteria ketuntasan minimal setidaknya minimal 75. Kriteria ketuntasan minimal dapat dimulai dengan standar ketuntasan minimal di bawah target nasional kemudian dinaikkan standar ketuntasan secara bertahap (Aini, 2020; Purnawirawan, 2021).

Penetapan kriteria ketuntasan minimal perlu memperhatikan beberapa hal sebagai berikut:

- 1) Kriteria ketuntasan minimal dapat ditetapkan dengan metode kualitatif atau kuantitatif. Metode kualitatif dapat dilakukan melalui profesional *judgement*, dengan memperhatikan kualitas kemampuan akademik pengalaman pendidik mengajar mata pelajaran di madrasahnyanya. Adapun yang dilakukan dengan rentang angka yang ditetapkan sesuai dengan penetapan kriteria yang disepakati disebut dengan metode kuantitatif.
- 2) Nilai kriteria ketuntasan minimal ditetapkan melalui analisis ketuntasan belajar minimal pada setiap kategori dengan memperhatikan intake peserta didik untuk mencapai ketuntasan kompetensi dasar dan standar kompetensi, kompleksitas serta daya dukung.
- 3) Kriteria ketuntasan minimal yang terdapat setiap Kompetensi Dasar (KD) merupakan akumulasi rata-rata dari kategori yang terdapat dalam KD tersebut.
- 4) Rata-rata kriteria ketuntasan minimal KD yang terdapat dalam setiap Kompetensi Inti (KI).
- 5) Kriteria ketuntasan minimal mata pelajaran merupakan rata-rata dari semua KKM-SK yang terdapat dalam satu semester atau satu tahun pembelajaran, dan dicantumkan dalam Laporan Hasil Belajar (LHB) atau rapor peserta didik.
- 6) Indikator merupakan acuan/rujukan bagi pendidik untuk membuat soal-soal ulangan, baik Penilaian Harian (PH), Penilaian Tengah Semester (PTS) maupun Penilaian Akhir Semester (PAS). Soal ulangan ataupun tugas-tugas harus mampu mencerminkan/menampilkan pencapaian indikator yang diujikan. Pada setiap indikator atau kompetensi dasar dimungkinkan adanya perbedaan nilai ketuntasan minimal.

KKM disusun dengan memperhatikan (paling tidak) tiga indikator, yaitu: karakteristik siswa (*intake*), karakteristik mata pelajaran (kompetensi materi), dan status satuan pendidikan (daya dukung). Formula untuk menghitung nilai akhir kriteria ketuntasan minimal per semester per tahun adalah sebagai berikut:

$$\frac{\text{Nilai Kriteria (K+D+I) X 100}}{\text{12 (Skor Maksimum)}} = \text{KKM Per KD \& Indikator}$$

*Keterangan:

K = Kompleksitas

D = Daya Dukung

I = Intake

Meningkatkan kemampuan guru dalam penentuan KKM dapat dilakukan secara bersama-sama melalui workshop. Workshop adalah salah satu kegiatan kolaboratif yang dapat membantu meningkatkan keterampilan. Sagala (2012)

menunjukkan ciri-ciri workshop di dalam dunia pendidikan sebagai berikut: 1) masalah yang didiskusikan bersifat *life-centric* dan muncul dalam diri peserta sendiri (para guru), 2) senantiasa mengoptimalkan aktivitas mental dan fisik dalam kegiatan untuk mencapai tingkat pengembangan keprofesian yang lebih tinggi dan lebih baik yang tercermin dari peningkatan kualitas guru setelah mengikuti kegiatan, (3) metode yang digunakan adalah pemecahan masalah, penalaran, dan penyelidikan, 4) kegiatan berdasarkan kebutuhan bersama, dan 4) penggunaan sumber-sumber yang dapat memberikan kontribusi material.

Tujuan diadakannya workshop pada awal Tahun Pelajaran adalah untuk memberikan pengalaman kepada guru-guru yang sedang menetapkan kriteria ketuntasan minimal di MTsN 2 Lhokseumawe. Dalam hal ini, kegiatan workshop dapat meningkatkan kemampuan guru dalam penetapan kriteria ketuntasan minimal di MTsN 2 Kota Lhokseumawe. Hal ini senada dengan hasil penelitian yang menyatakan bahwa workshop dapat meningkatkan kinerja guru dalam penetapan kriteria ketuntasan minimal (Khasanah, 2019; Sudiati, 2019).

Ametembun (2000) sependapat dengan Briggs dan Justman bahwa workshop merupakan kegiatan jangka pendek yang teratur secara fleksible dan dapat diselenggarakan secara informal, di mana pesertanya (guru maupun para pendidik lainnya) bekerja secara intensif dalam membahas suatu kebutuhan ataupun permasalahan yang timbul dalam pekerjaan sehari-hari. Banyak guru mengalami hambatan dalam penetapan kriteria ketuntasan minimal. krenanya workshop sangat diperlukan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, sehingga guru diharapkan memiliki kemampuan dalam menetapkan kriteria ketuntasan minimal sesuai dengan pedoman penetapannya.

Berdasarkan analisis dan pembahasan yang telah diurai pada bagian sebelumnya, terjadi peningkatan kemampuan bagi guru peserta workshop di MTsN 2 Kota Lhokseumawe dalam penetapan kriteria ketuntasan minimal. Proses pengaplikasian Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) melalui wokshop meningkatkan kemampuan guru untuk mengidentifikasi KKM yang diawali dengan supervisi awal. Pemantauan awal dilakukan untuk mengidentifikasi masalah yang mungkin ada dalam menetapkan kriteria penyelesaian minimum.

Langkah selanjutnya adalah menganalisis hasil supervisi dan mengadakan workshop. Untuk mengoptimalkan kemampuan guru, dilakukan juga kegiatan presentasi kelompok. Presentasi dilakukan oleh setiap kelompok guru mata pelajaran untuk meyakinkan mereka memahami dan andal dalam pelaksanaan proses menyusun KKM.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa pada siklus I didapati sebanyak 73,33% peserta belum memenuhi kesiapan bahan dalam pelaksanaan workshop. Adapun kemampuan guru dalam penetapan kriteria ketuntasan minimal masih belum memenuhi standar sebagaimana indikator kinerja yang ditetapkan. Hal ini disebabkan oleh kurangnya pelatihan dan sosialisasi KKM serta kurangnya kesiapan guru dalam mengikuti workshop.

Setelah dilakukan refleksi dan perbaikan pada siklus II, terlihat adanya peningkatan yang signifikan dalam kesiapan guru memenuhi bahan dalam pelaksanaan workshop, yaitu sebesar 86,67% (dikategorikan siap) dan hanya 13,33% (dikategorikan belum siap). Sementara kemampuan guru dalam penentuan kriteria ketuntasan minimal amat baik, yaitu sebesar 93,25%.

Secara keseluruhan, dapat dikatakan bahwa respon guru terhadap kegiatan workshop adalah positif (sangat baik) dan kemampuan guru dalam penyusunan KKM di MTsN 2 Lhokseumawe meningkat. Oleh karena itu, penerapan kegiatan workshop dalam menetapkan kriteria ketuntasan minimal perlu dilanjutkan dalam kegiatan lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Aini, R. (2020). Pelatihan Menetapkan Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) dalam Meningkatkan Kompetensi Guru UPTD SD Negeri Tlokoh 2 Kecamatan Kokop Kabupaten Bangkalan pada Tahun Pelajaran 2019/2020. *Jurnal Pendidikan & Pembelajaran*, 6(1), 74–82.
- Ametembun, N.A. (2000). *Supervisi Pendidikan, Penuntun bagi Penilik Pengawas Kepala Sekolah dan Guru-Guru*. Bandung: Suri.
- Amstrong. (1990). *Penilaian Pendidikan*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Arikunto, S., Suhardjono, & Supardi. (2021). *Penelitian Tindakan Kelas: Edisi Revisi*. Bumi Aksara.
- Depdiknas. (2008). *Penetapan Kriteria Ketuntasan Minimal*. Bandung: Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah.
- Hanum, L. (2017). *Perencanaan Pembelajaran*. Syiah Kuala University Press.
- Khasanah, S. (2019). Upaya Peningkatan Kinerja Guru dalam Menetapkan Kriteria Ketuntasan Minimal Melalui Workshop. *Bangun Rekaprima*, 5(1), 51–60. <https://doi.org/10.32497/bangunrekaprima.v5i1.1409>.
- Machali, I. (2014). Kebijakan Perubahan Kurikulum 2013 dalam Menyongsong Indonesia Emas Tahun 2045. *Jurnal Pendidikan Islam*, 3(1), 71–94. <https://doi.org/10.14421/jpi.2014.31.71-94>.
- Mardapi, D. (2012). *Pengukuran, Penilaian, dan Evaluasi Pendidikan* (Vol. 45). Nuha Medika.

- Muhammad, A. (1987). *Psikologi Industri, Edisi Ketiga*. Yogyakarta: Penerbit Lyberty.
- Nurwati, I. (2020). Mengembangkan Kemampuan Guru Menetapkan Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) melalui Kegiatan Workshop. *Didaktikum*, 20(3). <https://doi.org/https://doi.org/10.47403/didaktikum.v20i3.22>.
- Pangastuti, R., & MunfaAti, K. (2018). Penilaian Acuan Norma, Penilaian Acuan Patokan, Kriteria Ketuntasan Minimal di Madrasah Ibtidaiyah an-Nur Plus Junwangi Krian Sidorajo Jawa Timur. *Tarbiyah Al-Awlad: Jurnal Kependidikan Islam Tingkat Dasar*, 8(2), 202–217. <https://doi.org/https://doi.org/10.15548/alawlad.v8i2.1606>.
- Popham, W. J. (2009). *Instruction That Measures Up: Successful Teaching in the Age of Accountability*. ASCD.
- Purnawirawan, H. (2021). Implementasi Supervisi Kepala Sekolah terhadap Kinerja Guru dalam Menetapkan Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) pada Guru Bidang Studi SMP Negeri 1 Sendang Tulungagung Semester I Tahun Pelajaran 2018/2019. *Jurnal Pembelajaran Dan Ilmu Pendidikan*, 1(2), 296–303.
- Sagala, S. (2012). *Supervisi Pembelajaran dalam Profesi Pendidikan*. Bandung: Alfabeta.
- Siswanto, B. (1989). *Manajemen Tenaga Kerja, Rancangan dalam Pendayagunaan dan Pengembangan Unsur Tenaga Kerja*. Bandung: Sinar Baru.
- Sudanta, I. W. (2015). Efektivitas Kegiatan Workshop dalam Meningkatkan Kemampuan Menetapkan Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM). *Dharmasmrti: Jurnal Ilmu Agama Dan Kebudayaan*, 14(27), 75–84. <https://doi.org/10.32795/ds.v14i27.49>.
- Sudiati, T. (2019). Peningkatan Kinerja Guru dalam Menetapkan Kriteria Ketuntasan Minimal melalui Workshop. *Ilmu Pendidikan: Jurnal Kajian Teori Dan Praktik Kependidikan*, 3(2), 231–237. <https://doi.org/10.17977/um027v3i22018p231>.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.